

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pemberhentian dan Penggantian Presiden, dalam buku 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid (Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum)*. (Jakarta: Pusat Studi HTN, 2000).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Faja, Mukti. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Hakim, Abdul Azis. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Huda, Ni'matul. *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2019).
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Luhullima, James. *Hari-hari terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).

- Mahfud MD, Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Edisi Revisi.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. (Yogyakarta: Gema Media, 1999).
- Sarundajang, S.H., S.H. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012).
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Suharto, Susilo. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana, 2010).

JURNAL

- Ali, M. Mahrus, Alia Harumdani Widjaja dan Meyrinda Rahmawaty Hilipito. Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15. No. 4, 2018, hlm. 838.
- Arion, Tandi., dkk, Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 8 dan 10.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 2.
- Budiman, Muslimin. Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19 No. 1 Mei 2017, hlm. 41.
- Hamzani, Achmad Irwan. Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, September-Desember 2014, hlm. 137.

- Hariansah, Syafri dan Anna Erliyana. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis. *Pakuan Law Review*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 341-342.
- Ludwikowski, Rett R. 2003. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. *Boston Untversity International Law Journal*, Vol. 2, hlm. 29.
- Noviati, Cora Elly. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2 Juni 2013, hlm. 343.
- Nur, Al Qadri. 2013. Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, hlm. 42.
- Permana, I Putu Yogi Indra. Kajian Yuridis Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2 Desember 2018, hlm. 179.
- Saraswati, Retno. Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 139-140.
- Soemantri, Sri. Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap. (*Makalah-16 Desember 2005*), hlm. 14.
- Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU), Ctk. Kedua, *Jurnal UMM Press*, Malang 2003, hlm. 11.
- Triwahyuni, Dewi dan Fuqoha. Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 2 Jan – April 2015, hlm 34-44.
- Tutik, Titik Triwulan. Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Daulah UIN Surabaya*, Vol. 10 No. 2 Oktober 2020, hlm. 286-287.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

SUMBER LAIN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/triumvirat> pada tanggal 28 November 2020 pukul 09.15 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PELAKSANA%20TUGAS> pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 14.11 WIB.

Hadi Wawan. 2017. *Tiga Menteri Triumvirat*, diakses melalui: <https://www.hadiwawan.com/tiga-menteri-triumvirat.html> pada tanggal 28 November 2020 pukul 09.54 WIB.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *Surat Perintah Sebelas Maret*, diakses melalui: [ttps://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret) pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 19.31 WIB.

Arasy Pradana A. Azis. 2019. *Triumvirat Pengisi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5de4a026b17e2/triumvirat-pengisi-kekosongan-jabatan-Presiden-dan-wakil-Presiden/> pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 20.13 WIB.

Kanigoro. 2019. *Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, diakses melalui: <https://www.kanigoro.com/artikel/triumvirat-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/> pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.36 WIB.

FM Al Rasyid. 2019. *Jika Presiden dan Wapres "Tidak Ada" Bersamaan, Triumvirat Ini Berkuasa*, diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5db00f3e097f364207337522/jika-presiden-dan-wapres-tidak-ada-bersamaan-triumvirat-ini-paling-berkuasa?page=all> pada tanggal 17 November 2020 pukul 18.03 WIB.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wawancara Penulis dengan Bapak Afdhal Mahatta, S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 2021

Wawancara Penulis dengan Ibu Ni'mah Hidayah, S.H., M.H. selaku Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 26 Februari 2021